

Judul : Heboh, polemik 105 ribu pick up impor dari India
Tanggal : Jumat, 27 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Heboh, Polemik 105 Ribu Pick Up Impor Dari India

Impor sebanyak 105 ribu unit mobil pick up asal India menjadi perbincangan di kalangan anggota dewan dan pakar ekonomi. Meski rencananya ditunda, ternyata sudah ada unit yang tiba di Indonesia.

Penundaan itu disampaikan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (24/2/2026). Pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

"Apapun keputusan DPR itu adalah suara rakyat, dan wakil rakyat, saya sebagai direktur BUMN saya akan taat, loyal dan manut apapun keputusan negara, apabila itu memang kepentingan rakyat," kata Joao.

"Tanpa sedikit pun saya ragu-ragu kalau seandainya saya harus nanti diugut atau nanti dipermasalahkan oleh

pihak supplier, itu sudah tanggung jawab saya, dan saya ambil tanggung jawab itu," tambah dia.

Badan Usaha milik negara (BUMN) ini mengimpor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari India. Kontrak tersebut mencakup pengadaan total 105.000 unit kendaraan dari dua produsen otomotif asal India. Sebanyak 35.000 unit Scorpio Pickup dipasok oleh Mahindra, sementara 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors, terdiri atas 35.000 unit Yodha Pickup dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.

Namun diketahui pick up asal India ini telah masuk Indonesia secara bertahap. Untuk sementara, unit kendaraan akan disimpan di Kodim, sembari menunggu kesetiaan koperasi. Sampai akhir bulan nanti akan tiba sebanyak 1.000 unit.

Lantas bagaimana dengan unit-unit yang sudah tiba di Indonesia? Joao me-

ngaku tidak akan menggunakan mobil tersebut jika kebijakannya memang melarang penggunaan unit tersebut. "Unit yang sudah sampai, tetap kami manut dan taat kepada pemerintah dan DPR, di mana mereka pilihan rakyat, jadi kalau memang disuruh tidak boleh dipakai, kami tidak akan dipakai. Apapun risikonya, itu konsekuensi yang harus diambil," ujar Joao.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufrmi Dasco Ahmad berpesan kepada pemerintah agar menunda terlebih dahulu rencana impor 105.000 mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurut dia, rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri. Presiden pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut.

Selain itu, dia menilai Presiden juga akan meminta pendapat dan mengalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. "Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," kata Dasco.

Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza menilai rencana impor 105 ribu unit mobil pick up senilai Rp24 triliun dari India perlu disikapi secara hati-hati dan strategis. Menurutnya, kebijakan tersebut harus tetap berpijak pada upaya memperkuat daya saing industri otomotif nasional serta mendukung Program Strategis Nasional (PSN).

"Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat industri dalam negeri agar berkelanjutan," katanya, di Jakarta. Bar (25/3/2026).

Sementara pakar ekonom dan koperasi, Bahtiar Maddatuang menilai, terlepas dari pro dan kontra terhadap langkah impor mobil pick up ini, bagi Bahtiar secara substansi, pengadaan mobil untuk operasionalisasi KDKMP sangat strategis.

"Kendaraan ini dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan, terutama dalam distribusi pangan desa. Mobil pick up berperan mengangkut hasil pertanian ke pasar serta menghubungkan petani langsung dengan konsumen, sehingga tercipta *fair price* atau harga yang wajar bagi petani dan masyarakat," bilanginya.

Untuk mengetahui lebih dalam soal mobil pembelian 105 ribu unit mobil pick up ini, simak wawancara, Rycko Menoza dan Bahtiar Maddatuang, di bawah ini.

RYCKO MENOZA, Anggota Komisi VII DPR RI
Ini Momentum Mendorong Daya Saing Industri Otomotif

BAHTIAR MADDATUANG, Pakar Ekonom dan Koperasi
Perlu Konsolidasi Ulang Pada Kebijakan Impor Ini



“**Artinya, setiap kebijakan impor harus selaras dengan upaya memperkuat industri nasional, menciptakan nilai tambah, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai kebijakan impor justru melemahkan kapasitas industri dalam negeri yang sebenarnya mampu.**”

Soal polemik impor mobil pick up asal India, bagaimana pandangan Anda?

Saya melihat polemik ini harus ditempatkan secara proporsional. Rencana impor mobil pick up memang menimbulkan pro dan kontra, tetapi di sisi lain ini juga bisa menjadi momentum strategis untuk mendorong daya saing industri otomotif nasional. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat industri dalam negeri agar berkelanjutan.

Pemerintah sebaiknya seperti apa menyikapi pro kontra pengadaan mobil pick up dari India ini?

Pemerintah harus menyikapi secara bijak dan komprehensif. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa seluruh sumber daya industri

di Indonesia harus dimanfaatkan secara maksimal. Artinya, setiap kebijakan impor harus selaras dengan upaya memperkuat industri nasional, menciptakan nilai tambah, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai kebijakan impor justru melemahkan kapasitas industri dalam negeri yang sebenarnya mampu.

Skema apa yang perlu disiapkan untuk memastikan impor mobil pick up tidak mengganggu industri dalam negeri?

Skema kerja operasional yang kolaboratif harus disiapkan sejak awal. Impor tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan keterlibatan produsen otomotif nasional. Misalnya melalui skema alih produksi, pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), atau pemusatan kepada in-

dustri dalam negeri untuk mengambil peran strategis dalam Program Strategis Nasional (PSN). Dengan demikian, seluruh sektor bisa bergerak bersama tanpa ada yang ditinggalkan.

Sebenarnya apakah industri otomotif nasional bisa memenuhi kebutuhan mobil pick up sebanyak ini?

Berdasarkan data, industri otomotif nasional sangat mampu. Produsen kendaraan pick up di dalam negeri, yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, memiliki kapasitas produksi lebih dari 400 ribu unit per tahun. Kapasitas ini bahkan belum dimanfaatkan secara optimal. Mayoritas kendaraan yang diproduksi adalah pick up penggerak 4x2 yang memang paling banyak dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia. ■ KAL

“**Secara substansi, pengadaan mobil untuk operasionalisasi KDKMP sangat strategis. Kendaraan ini dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan, terutama dalam distribusi pangan desa. Mobil pick up berperan mengangkut hasil pertanian ke pasar serta menghubungkan petani langsung.**”

Terkait impor mobil pick up dari India untuk Kodes, pandangan Anda bagaimana?

Pada prinsipnya, impor mobil pick up untuk operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan urusan negara. Mandat pengadaan tersebut diberikan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun, proses pengadaan ini memang masih menuai kontroversi, terutama karena dilakukan dari India. Bahkan, pimpinan DPR RI Dasco Ahmad telah meminta agar kebijakan ini ditinjau ulang.

Pemerintah sebaiknya seperti apa menyikapi pro kontra pengadaan mobil pick up dari India ini?

Atas saran DPR untuk melakukan kajian peninjauan ulang, Pemerintah sebaiknya melakukan konsolidasi ulang terhadap kebijakan impor ini.



Konsolidasi tersebut harus tetap mengedepankan asas efisiensi dan efektivitas, tanpa menghilangkan substansi utama, yakni kebutuhan operasionalisasi KDKMP. Artinya, perdebatan soal impor tidak boleh mengorbankan tujuan strategis koperasi desa itu sendiri.

Terlepas dari pro kontra soal impor pick up ini, menurut Anda seberapa mendesak kebutuhan mobil pick up sebagai kendaraan operasional koperasi desa/kelurahan?

Secara substansi, pengadaan mobil untuk operasionalisasi KDKMP sangat strategis. Kendaraan ini dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan, terutama dalam distribusi pangan desa. Mobil pick up berperan mengangkut hasil pertanian ke pasar

serta menghubungkan petani langsung dengan konsumen, sehingga tercipta *fair price*, atau harga yang wajar bagi petani dan masyarakat.

Dari perspektif pemberdayaan desa, apakah pengadaan mobil pick up ini benar-benar akan meningkatkan produktivitas koperasi?

Jika dikelola dengan tepat, pengadaan mobil pick up akan meningkatkan produktivitas koperasi. Operasionalisasi KDKMP sangat bergantung pada kelancaran distribusi dan logistik desa. Tanpa sarana angkut yang memadai, koperasi akan kesulitan menjalankan fungsi bisnisnya. Karena itu, kendaraan operasional menjadi instrumen penting, bukan sekadar aset, selama pemanfaatannya terintegrasi dengan kebutuhan riil koperasi. ■ KAL